



**BerAKHLAK** **#** bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

# RENCANA KERJA

## Tahun 2023



Pandemi memberi ruang untuk terus maju dan melayani,  
mengukir prestasi tingkatkan kinerja

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**



Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**  
  
**ANDI ISLAMUDDIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku. Semoga seluruh upaya yang tercurah mendapat ridho di sisi Allah SWT.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja adalah salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Rencana Kerja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga dokumen Renja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Watampone, 25 Juli 2022  
Kepala Dinas,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19681122 198908 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	35
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
• Pohon Kinerja Renstra Perubahan Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	
• Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 (Cetakan SIPD)	

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah...	13
Tabel T-C 30 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	21
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022.....	28
Tabel T-C 33 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023.....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone. Dokumen ini kemudian menjadi kiblat dalam penyusunan Renja PD.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dan Partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang secara berjenjang di tiap tingkatan Pemerintah mulai Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional.

Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti Perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten Bone, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaran terkait. Hasil Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai Pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD ) setiap Tahun Anggaran.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan tugas pada keempat bidang urusan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam bentuk kegiatan yang terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan yang baik sehingga pelaksanaannya sejalan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang sangat besar akan komunikasi, teknologi informatika, persandian dan statistik yang berbasis elektronik di masa sekarang ini. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di masing-masing bidang dan sekretariat.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Perubahan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2018-2023.

#### **Tujuan**

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun Anggaran 2023.
2. Menjadi dasar dalam melakukan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
3. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini memuat:

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **Bab II Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Menyajikan Uraian tentang:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **Bab III Tujuan dan Sasaran**

Menyajikan uraian tentang:

- A. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menyajikan Uraian tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

#### **Bab V Penutup**

Menyajikan Kesimpulan dan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun dalam hal ketersediaan Anggaran yang tidak sesuai harapan atas tindak lanjut Rencana Kerja Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan untuk menunjang kinerja yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan 3 (tiga) Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ini merupakan Sub Kegiatan yang mengampu perencanaan dan penganggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.992.150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.802.550,- atau 96,28% dengan realisasi fisik 120% dari target 5 dokumen perencanaan dan realisasi sebanyak 6 dokumen yaitu RKPD 2022, Renstra Perubahan 2018-2023, Renja Perubahan 2021, Renja Pokok 2022, RKA Perubahan 2021, dan RKA Pokok 2022.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan ini mengampu pelaksanaan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.153.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.257.800,- atau 93,71% dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target 3 dokumen dan realisasi sebanyak 3 dokumen yaitu LPPD, LKJIP, dan Laporan Evaluasi Renja.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan ini merupakan Sub Kegiatan yang mengampu pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.437.671.531 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.472.947.696,- atau 101,03% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kurangnya alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan disebabkan oleh tidak adanya asistensi kebutuhan gaji pada OPD oleh Tim Anggaran sebelum penyusunan DPPA Tahun Anggaran 2021, namun pembayaran gaji ASN tetap terealisasi karena akumulasi anggaran gaji dan tunjangan ASN Kabupaten Bone mencukupi.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub Kegiatan ini mengampu penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan laporan keuangan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.818.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.072.150,- atau 95,57% dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target 19 laporan dan realisasi sebanyak 19 laporan yaitu 12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengampu 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan ini mengampu peningkatan kapasitas/kemampuan ASN melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan Bimtek ataupun Sosialisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.550.000,- atau 15,50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh banyaknya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui zoom ataupun pelaksanaan yang tidak memungut biaya kontribusi bagi peserta Bimtek ataupun Sosialisasi.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengampu 7 (tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan ini mengampu penyediaan alat listrik dan penerangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.993.500 dan realisasi sebesar Rp. 6.253.500 atau 78,23% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini mencakup seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.861.350 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.861.350 atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Jumlah alokasi anggaran yang besar dikarenakan peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone menggunakan sistem satu pintu.
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan ini mencakup pemenuhan kebutuhan alat-alat kebersihan dan peralatan rumah tangga lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.959.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.959.000 atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik kantor, sub kegiatan ini mencakup seluruh kebutuhan makanan dan minuman meliputi makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 216.978.350 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 216.944.050 atau 99,98% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman 35 orang ASN dan 36 orang tenaga kontrak yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone selama 1 tahun.
  - 5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, sub kegiatan ini mencakup kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 23.748.900 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.344.400 atau 85,66% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, sub kegiatan ini mencakup peyediaan bahan bacaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000 dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan perjalanan Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan pelaksanaan perjalanan yang tidak dapat dicover oleh anggaran Bidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.949.000 dan realiasi anggaran sebesar Rp. 156.866.450 atau 78,06% dengan realiasi fisik sebesar 121,49% dari target 121 kali terealisasi sebanyak 147 kali.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Meubel, sub kegiatan ini mencakup pengadaan meubel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 2) Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 905.320.000 dan realisasi sebesar Rp. 764.155.100 atau 84,41% dengan realiasi fisik sebesar 92,86% dari 14 unit dan realisasi sebanyak 13 unit, hal ini disebabkan adanya satu unit peralatan yang harganya jauh di atas harga standar yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga barang tersebut tidak diadakan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini mencakup pembayaran jasa/upah kerja tenaga kontrak/sukarela dengan alokasi anggaran Rp. 236.832.000 dan realisasi sebesar Rp. 235.704.860 atau 99,52% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.689.700 dan realisasi sebesar Rp. 38.130.899 atau 96,07% dengan realisasi fisik 100%.
  - 2) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 36.000.000 dan realiasi anggaran Rp. 16.179.900 atau 44,94% dengan realiasi fisik 100%.
  - 3) 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 70.028.600 atau 99,42% dengan realisasi fisik 100%.

## **2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Monitoring Opini Publik Dan Aspirasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengaduan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat melalui aplikasi SPAN LAPOR dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.774.450 dan realiasi anggaran sebesar Rp. 38.092.850 atau 85,08% dengan realiasi fisik sebesar 183,33% dari target sebanyak 33 laporan dan tindak lanjut dengan realisasi sebanyak 55 laporan dan tindak lanjut.
  - 2) Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan pendataan terhadap media komunikasi yang ada di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.274.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.281.200 atau sebesar 75,47% dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target dan realiasi sebanyak 6 Kecamatan.
  - 3) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup peyebarluasan informasi melalui konten dan berbagai media lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 238.184.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.195.100 atau sebesar 98,75% dengan realisasi fisik sebesar 198% dari 3 indikator dengan rincian realisasi sebagai berikut:
    - a) Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center dari target 100 publikasi terealisasi sebanyak 394 publikasi atau sebesar 394,00%;
    - b) Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dari target 90 konten terealisasi sebanyak 90 konten atau sebesar 100%;

- c) Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan dari target 10 layanan terealisasi sebanyak 10 layanan atau sebesar 100%.
- 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan media komunikasi pemerintah yaitu Lembaga Penyiaran Pemerintah Radio Suara Bone Beradat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.786.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.929.240 atau sebesar 93,62% dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target 4 program dan terealisasi sebanyak 4 program.
- 5) Pelayanan Informasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui PPID dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.924.750 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.926.750 atau sebesar 83,84% dengan realisasi fisik sebesar 100,60% dari target jumlah dokumen informasi dan dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone sebanyak 500 dokumen dan terealisasi sebanyak 503 dokumen.
- 6) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, sub kegiatan ini mencakup pelayanan sound system seluruh OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.116.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.627.600 atau sebesar 96,19% dengan realisasi fisik sebesar 106,06% dari target jumlah pelayanan sound sistem dan mobil informasi yang terlaksana sebanyak 33 kegiatan terealisasi sebanyak 35 Kegiatan.
- 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok informasi masyarakat yang tersebar di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.999.850 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.947.850 atau sebesar 89,74% dengan realisasi fisik sebesar 154,55% dari target jumlah kelompok informasi yang dibina sebanyak 22 kelompok terealisasi sebanyak 34 kelompok.
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas, sub kegiatan ini mencakup kerjasama dengan media massa, media cetak dan media online dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 709.690.050 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.667.750 atau sebesar 95,49% dengan realisasi fisik sebesar 67,31%. Rendahnya capaian realisasi fisik disebabkan karena diantara 52 media yang menjadi target terdapat 17 media yang gagal berkontrak karena sampai batas waktu yang diberikan media tersebut tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan kontrak sehingga media yang berkontrak hanya sebanyak 35 media.

### **3. Program Aplikasi Informatika**

Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan website dan penyediaan jaringan bagi seluruh OPD di Kabupaten Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.494.774.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.462.674.560 atau sebesar 97,85% dengan realisasi fisik sebesar 107,69% dari 6 (enam) indikator dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidtdtch 275s.d 400 Mbps di Kabupaten Kota dari target 57 titik terealisasi sebanyak 57 titik atau sebesar 100%;

- b) Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo dari target 39 OPD terealisasi sebanyak 48 OPD atau sebesar 123,08%;
  - c) Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo dari target 39 OPD terealisasi sebanyak 48 OPD atau sebesar 123,08%;
  - d) Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah dari target 66 OPD terealisasi sebanyak 66 OPD atau sebesar 100%;
  - e) Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dari target 66 OPD terealisasi sebanyak 66 atau sebesar 100%;
  - f) Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) dari target 66 OPD terealisasi sebanyak 66 OPD atau sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengampu 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.390.550 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.001.550 atau sebesar 78,78% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 2) Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.168.500 dan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.141.700 atau sebesar 99,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 3) Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah, sub kegiatan ini mencakup peningkatan pengetahuan pengelola web, publikasi melalui web dan ketersediaan sub domain pada OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.854.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.175.000 atau sebesar 90,04 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.

#### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, sub kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan dan penyusunan dokumen statistik sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.608.700 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.943.500 atau sebesar 93,27% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, sub kegiatan ini mencakup peningkatan mutu aparat pengelola data statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.999.900 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.863.500 atau sebesar 96,66% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 3) Membangun Meta Data Statistik Sektoral, sub kegiatan ini mencakup penelitian dan pengumpulan metadata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.921.700 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.516.900 atau sebesar 93,11% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

## **5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.009.700 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.564.900 atau sebesar 83,60% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.844.050 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.312.850 atau sebesar 84,54% dengan realisasi fisik sebesar 120,95% dari 3 (tiga) indikator dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Jumlah Berita/Informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu dari target 1.000 berita terealisasi sebanyak 1.303 berita atau sebesar 130,30%;
    - b) Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan dari target 43 kegiatan terealisasi sebanyak 43 kegiatan atau sebesar 100%;
    - c) Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan dengan target 43 titik terealisasi sebanyak 57 titik atau sebesar 132,56%.
- b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.148.350 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.366.750 atau sebesar 87,24% dengan realisasi fisik sebesar 107,70% dari indikator jumlah berita yang diterima melalui JKS dengan target 1.000 berita terealisasi sebesar 1.077 berita.

(Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C. 29)

**Tabel T-C. 29**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

- 1 Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah = 100
- 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 85
- 3 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo= 75
- 4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 95
- 5 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah = 100

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<b>2.16</b>		<b>Sub Urusan Komunikasi dan Informatika</b>														
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	6.027.517.670	-	-	100%	5.397.202.481	100,66%	5.206.854.805	100,66%	5.206.854.805	100,66%	96,47%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	8	77.000.000	-	-	8	62.145.150	9	59.060.350	9	59.060.350	112,50%	76,70%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	5	42.000.000	-	-	5	31.992.150	6	30.802.550	6	30.802.550	120,00%	73,34%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3	35.000.000	-	-	3	30.153.000	3	28.257.800	3	28.257.800	100,00%	80,74%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3.786.978.000	-	-	100%	3.454.489.531	100,00%	3.489.019.846	100,00%	3.489.019.846	100,00%	92,13%	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan	40	3.756.978.000	-	-	35	3.437.671.531	35	3.472.947.696	35	3.472.947.696	87,50%	92,44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	19	30.000.000	-	-	19	16.818.000	19	16.072.150	19	16.072.150	100,00%	53,57%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung</b>	100%	20.000.000	-	-	100%	10.000.000	10,00%	1.550.000	10,00%	1.550.000	10,00%	7,75%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)	4	20.000.000	-	-	2	10.000.000	2	1.550.000	2	1.550.000	50,00%	7,75%
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	6				2		2		2		33,33%	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi perkantoran</b>	100%	555.000.000	-	-	100%	572.290.100	110,85%	523.025.250	110,85%	523.025.250	110,85%	94,24%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	11	23.000.000	-	-	11	7.993.500	11	6.253.500	11	6.253.500	100,00%	27,19%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	32	170.000.000	-	-	32	113.861.350	32	113.857.850	32	113.857.850	100,00%	66,98%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	11	7.000.000	-	-	11	3.959.000	11	3.959.000	11	3.959.000	100,00%	56,56%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	14	120.000.000	-	-	14	216.978.350	14	216.944.050	14	216.944.050	100,00%	180,79%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	4	27.000.000	-	-	4	23.748.900	4	20.344.400	4	20.344.400	100,00%	75,35%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang di beli setiap bulan	48	8.000.000	-	-	48	4.800.000	48	4.800.000	48	4.800.000	100,00%	60,00%
		Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	130	200.000.000	-	-	121	200.949.000	147	156.866.450	147	156.866.450	113,08%	78,43%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	100%	1.071.807.670	-	-	100%	915.320.000	93,75%	774.155.100	93,75%	774.155.100	93,75%	72,23%

		<b>Pemerintahan Daerah</b>														
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	2	30.000.000	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100,00%	33,33%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di beli	14	1.041.807.670	-	-	14	905.320.000	13	764.155.100	13	764.155.100	92,86%	73,35%	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	293.732.000	-	-	100%	236.832.000	100,00%	235.704.860	100,00%	235.704.860	100,00%	80,24%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	432	293.732.000	-	-	432	236.832.000	432	235.704.860	432	235.704.860	100,00%	80,24%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	100%	223.000.000	-	-	100%	146.125.700	100,00%	124.339.399	100,00%	124.339.399	100,00%	55,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	48.000.000	-	-	3	39.689.700	3	38.130.899	3	38.130.899	100,00%	79,44%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara lainnya	5	45.000.000	-	-	5	36.000.000	5	16.179.900	5	16.179.900	100,00%	35,96%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung yang direhab	836	130.000.000	-	-	318	70.436.000	318	70.028.600	318	70.028.600	38,04%	53,87%	
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	100%	1.277.374.470		-	85%	1.190.749.400	101,11%	1.130.668.340	101,11%	1.130.668.340	101,11%	88,52%	Dinas Kominfo dan Persandian
		<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>	100%	1.277.374.470	-	-	82%	1.190.749.400	101,11%	1.130.688.340	101,11%	1.130.668.340	101,11%	88,52%	
		Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti	36	67.000.000	-	-	30	44.774.450	55	38.092.850	55	38.092.850	152,78%	56,86%	
			Jumlah Pengaduan yang di terima					30		55		55				

		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6	25.000.000	-	-	6	16.274.000	6	12.281.200	6	12.281.200	100,00%	49,12%
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center	200	145.000.000	-	-	100	238.184.300	394	235.195.100	394	235.195.100	197,00%	162,20%
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	130				90		90		90		69,23%	
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	20				10		10		10		50,00%	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4	100.000.000	-	-	4	91.786.000	4	85.929.240	4	85.929.240	100,00%	85,93%
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPIID Kabupaten Bone	1.570	55.000.000	-	-	500	30.924.750	503	25.926.750	503	25.926.750	32,04%	47,14%
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	69				23		23					
			Jumlah data yang dapat berbagi pakai	9				9		9		9		100,00%	
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1				1		3		3		300,00%	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	40	75.000.000	-	-	33	39.116.000	35	37.627.600	35	37.627.600	87,50%	50,17%
		Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	42	30.000.000	-	-	22	19.999.850	34	17.947.850	34	17.947.850	80,95%	59,83%
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	55	780.374.470	-	-	52	709.690.050	35	677.667.750	35	677.667.750	63,64%	86,84%

			Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	32				52		35		35		109,38%		
3	meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85%	1.795.994.615	-	-	75%	1.554.187.250	75,58%	1.514.992.810	75,58%	1.514.992.810	88,92%	84,35%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone	100%	1.690.994.615	-	-	100%	1.494.774.000	101,55%	1.462.674.560	101,55%	1.462.674.560	101,55%	86,50%	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidth 275 s.d 400 Mbps di kabupaten kota	75	1.690.994.615	-	-	57	1.494.774.000	57	1.462.674.560	57	1.462.674.560	76,00%	86,50%	
			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	66				39		48		48		72,73%		
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	66				39		48		48		72,73%		
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	66				66		66		66				
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah	66				66		66		66		100,00%		
			Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	66				66		66		66		100,00%		
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	100%	105.000.000	-	-	79%	59.413.250	79,00%	52.318.250	79,00%	52.318.250	79,00%	49,83%	

		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)	3	35.000.000	-	-	1	25.390.550	100,00%	20.001.550	100,00%	20.001.550	33,33%	57,15%
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	7				7		7		7		100,00%	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terintegrasi	4	35.000.000	-	-	1	17.168.500	1	17.141.700	1	17.141.700	25,00%	48,98%
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	39				32		32		32		82,05%	
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	27				23		23		23		85,19%	
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	9				3		3		3		33,33%	
			Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	6				4		4		4		66,67%	
		Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website, Vidcom)	5	35.000.000	-	-	2	16.854.200	2	15.175.000	2	15.175.000	40,00%	43,36%
			Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara	420				400		400		400		95,24%	
			Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	66				66		66		66		100,00%	

4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	129.000.000	-	-	95%	108.530.300	95,00%	102.323.900	95,00%	65.380.400	95,00%	50,68%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	1	129.000.000	-	-	95%	108.530.300	95,00%	102.323.900	95,00%	65.380.400	95,00%	50,68%	
		Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen yang disusun	11	55.000.000	-	-	3	39.608.700	3	36.943.500	3	-	27,27%	0,00%	
		Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)	6				2		2		2		33,33%		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan (Kegiatan)	3				1		1		1		33,33%		
			Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan (Dokumen)	3				1		1		1		33,33%		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	3				1		1		1		33,33%		
			Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	3				1		1		1		33,33%		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)	5	37.000.000	-	-	1	33.999.900	1	32.863.500	1	32.863.500	20,00%	88,82%	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	5	37.000.000	-	-	2	34.921.700	2	32.516.900	2	32.516.900	40,00%	87,88%	
			Jumlah Kelenkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral (Kegiatan)	9				3		3		3		33,33%		
			Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel dektoral (Variabel)	90				50		50		50		55,56%		
5	Terselenggaranya Tata Kekola Persandian Daerah dengan Baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	120.000.000		-	100%	97.002.100	116,57%	83.244.500	116,57%	83.244.500	116,57%	69,37%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	60.000.000	-	-	100%	43.853.750	125,44%	36.877.750	125,44%	36.877.750	125,44%	61,46%	

		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	4	27.000.000	-	-	4	21.009.700	4	17.564.900	4	17.564.900	100,00%	65,06%
			Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah	39				39		39		39		100,00%	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita/Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	1.000	33.000.000	-	-	1.000	22.844.050	1.303	19.312.850	1.303	19.312.850	130,30%	58,52%
			Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	66				43		43		43		65,15%	
			Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	66				43		57		57		86,36%	
		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>	100%	60.000.000	-	-	100	53.148.350	107,70%	46.366.750	107,70%	46.366.750	107,70%	77,28%
		Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1.000	60.000.000	-	-	1.000	53.148.350	1.077	46.366.750	1.077	46.366.750	107,70%	77,28%
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>97,78%</b>	<b>8.038.084.355</b>				

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah instansi yang membidangi 3 (tiga) urusan yaitu komunikasi informatika, statistik dan persandian melaksanakan tugas dalam menjamin dan menyelenggarakan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah maupun masyarakat, ketersediaan data statistik yang valid dan menjamin keamanan persandian pemerintah. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang terdiri dari:

(Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan akan disajikan dalam Tabel T-C.30)

**Tabel T-C. 30 Renja 2023**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TRW II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Presikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP			BB	BB	A	A	BB		A	A	
	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100,96%	75,99%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun			8	6	7	8	9	4	7	8	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun			5	3	4	5	6				
	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik			3	3	3	3	3	3	3	3	
	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	47,32%	100%	100%	
	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan			35	37	40	40	35	33	40	40	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun			19	19	19	19	19	10	19	19	
	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)			2	2	4	4	2	0	4	4	
	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	116,06%	64,34%	100%	100%	
	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli			11	5	11	11	11	0	11	11	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli			32	32	32	32	32	16	32	32	
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli			11	0	11	11	11	0	11	11	
	Jumlah Bahan Logistik kantor yang dibeli			14	14	14	14	14	9	14	14	
	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan			4	4	4	4	4	2	4	4	
	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli setiap bulan			48	0	48	48	48	0	48	48	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TRW II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang diikuti			121	60	130	130	147	47	130	130	
	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93,75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah Mebel yang dibeli			2	0	2	2	2	0	2	2	
	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli			14	4	14	14	13	3	14	14	
	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan			432	432	432	432	432	216	432	432	
	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71,43%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			5	4	5	5	5	4	5	5	
	Jumlah dan luas gedung yang direhab			318	0	518	518	318	0	518	518	
	<b>Persentase Layanan Publik Dinas dan Informatika</b>			<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>117,65%</b>	<b>89,15%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>			<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>	<b>89,15%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	
	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>			<b>82%</b>	<b>85%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>83,84%</b>	<b>89,15%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	
	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti			30	33	36	40	55	44	36	40	
	Jumlah Pengaduan yang diterima			30	33	36	40	55	44	36	40	
	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya			6	6	6	9	6	3	6	9	
	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center			100	150	200	210	394	91	200	210	
	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			90	110	130	140	90	81	130	140	
	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			10	15	20	25	10	17	20	25	
	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana			4	4	4	48	4	4	4	48	
	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone			500	520	550	600	503	162	550	600	
	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			22	23	23	25	22	23	23	25	
	Jumlah data yang dapat berbagi pakai			9	9	9	9	9	9	9	9	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TRW II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			1	1	1	1	2	1	1	1	
	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana			33	36	40	42	35	23	40	42	
	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina			22	20	42	45	34	20	42	45	
	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan			52	30	32	35	35	24	32	35	
	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota			52	30	32	35	35	24	32	35	
	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo</b>			<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>103,90%</b>	<b>84,62%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	
	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>			<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>72,73%</b>	<b>84,62%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	
	<b>Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidth 275 s.d 400 Mbps di Kabupaten Kota			57	9	9	9	57	9	9	9	
	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			39	48	57	65	48	55	57	65	
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo			39	48	57	65	48	55	57	65	
	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah			66	66	66	65	66	65	66	65	
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah			66	66	66	65	66	65	66	65	
	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)			66	66	66	65	66	65	66	65	
	<b>Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota</b>			<b>79%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81,59%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)			1	1	1	1	1	0	1	1	
	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city			7	7	7	10	7	10	7	10	
	Jumlah Aplikasi terintegrasi			1	1	2	3	1	1	2	3	
	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			32	39	39	39	32	32	39	39	
	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			22	25	27	27	22	22	27	27	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TRW II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik			3	4	5	5	3	3	5	5	
	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			4	5	6	6	4	4	6	6	
	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			0	0	1	1	0	0	1	1	
	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website, Vidcom)			2	1	2	3	2	0	2	3	
	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara			400	410	320	400	400	102	320	400	
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar			66	66	66	65	66	65	66	65	
	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b>			<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah dokumen yang disusun			3	3	5	3	3	0	5	3	
	Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)			2	2	2	2	2	0	2	2	
	Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan			1	1	1	1	1	0	1	1	
	Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan			1	1	1	1	1	0	1	1	
	Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS			1	1	1	1	1	0	1	1	
	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS			1	1	1	1	1	0	1	1	
	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)			1	1	3	3	1	1	3	3	
	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan			2	1	2	2	2	0	2	2	
	Jumlah Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral			3	3	3	3	3	0	3	3	
	Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel sektoral			50	60	90	100	50	30	90	100	
	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>			<b>525</b>	<b>584</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>34,11%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>34,11%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian			4	4	4	12	4	1	4	12	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TRW II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah			39	39	39	39	39	39	39	39	
	Jumlah Berita/Informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu			1000	1000	1000	1200	1303	253	1000	1200	
	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			43	52	66	65	43	43	66	65	
	Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan			43	57	66	65	57	57	66	65	
	<b>Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>34,80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS			1000	1000	1000	1200	1077	348	1000	1200	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan mengidentifikasi isu strategis serta faktor-faktor yang mempengaruhi isu yang ada pada setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone membidangi 3 (Urusan) Bidang Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang diampu oleh 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Adapun isu strategis Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu:

#### 1. urusan Komunikasi Informatika

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terbentuk pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten masih tergolong baru. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung khususnya fasilitas teknologi informatika dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Sejak WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) mendeklarasikan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020 dan di Indonesia ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Hal ini pastinya sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan seperti Perekonomian, Pemerintahan, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Hal ini merupakan tantangan besar Bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai OPD yang mengampu 3 (tiga) urusan yakni Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian. Sejak covid-19 menyebar di Indonesia, maka pemerintah memberlakukan pembatasan pada seluruh aktivitas masyarakat. Pegawai dan karyawan bekerja dari rumah dan seluruh sekolah dan perguruan tinggi diharuskan untuk belajar on-line, seluruh pertemuan dan rapat dilaksanakan melalui

system zoom meeting. Hal ini tentu bukan tanpa halangan, dengan adanya hal tersebut Dinas Kominfo harus berupaya keras untuk menyiapkan kapasitas bandwidth yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk membackup pelaksanaan zoom meeting dan video conference.

- c. Dimasa pandemic seperti saat dimana selama kurang lebih 2 tahun terakhir segala aktivitas pemerintahan sangat mengandalkan teknologi informatika berbanding terbalik dengan sumber daya aparatur khususnya terkait dengan pengelola teknologi informatika yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentu membutuhkan kerja lebih bagi aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian saat harus menghandle beberapa kegiatan baik itu zoom meeting maupun video conference pada waktu yang bersamaan.
- d. Dengan luas wilayah terbesar ketiga di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa wilayah masih memiliki area yang blank spot yang belum terjangkau jaringan Seluler yang tersebar di beberapa Kecamatan.
- e. Kondisi geografis Kabupaten Bone, merupakan kabupaten dengan wilayah otonom terluas ketiga di Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km<sup>2</sup> persegi, dengan jumlah penduduk 812.842 jiwa dan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 157 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaran penduduk yang tidak merata dan jarak antar pusat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa berpotensi menjadi penyebab komunikasi tidak efektif. Meski tak dapat dipungkiri bahwa modernisasi teknologi komunikasi informasi secara umum bisa menjadi solusi. Namun, di beberapawilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi yang masih minim, tentunya solusi tersebut tidak berlaku lagi. Di perlukan metode publikasi yang terintegrasi dengan pendekatan komunikasi publik seperti melalui pengumuman di Radio, kelompok dan simpul-simpul sosial kemasyarakatan, atau melalui media below the line seperti spanduk, baliho, poster dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk pemenuhan aspek komunikasi pemerintahan yang efektif tentunya dibutuhkan supporting system yang lengkap. Mulai dari anggaran yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menguasai bidang tugas yang diemban.

## **2. Urusan Statistik**

- a. Belum adanya data yang akurat, Valid dan relevan serta up to date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.
- b. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kualifikasi pendidikan formal.
- c. Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kemampuan teknis perencanaan.
- d. Masih kurang sinergisnya koordinasi antar SKPD terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data statistic daalam proses perencanaan.

## **3. Urusan Persandian**

Belum adanya Peralatan dan Tenaga Pengelola Persandian yang memadai.

Isu-isu di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kabupaten Bone dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik serta dapat menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah

bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi, karena memperoleh Informasi merupakan hak azasi manusia individu atau masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang berbunyi : “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan amanat Undang- Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar publik untuk memperoleh Informasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh:

1. Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh:
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel T-C 31 sebagai berikut:

Tabel T-C 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	4.747.229.460	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	4.943.158.659	
A	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	6 Dokumen	28.980.000	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	6 Dokumen	47.228.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	15.330.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.350.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3 Dokumen	13.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3 Dokumen	40.878.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3.594.065.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3.453.579.899	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan	37 Orang	3.586.140.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan	37 Orang	3.442.929.899	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	19 Laporan	7.925.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	19 Laporan	10.650.000	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	40.460.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	40.460.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)  Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	2 Orang  2 Orang	40.460.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)  Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	2 Orang  2 Orang	40.460.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	363.036.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	568.215.230	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	5 Jenis	1.660.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	5 Jenis	1.660.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	32 Jenis	92.746.460	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	32 Jenis	93.263.060	

8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Bahan Logistik kantor yang dibeli	14 Jenis	151.380.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Bahan Logistik kantor yang dibeli	14 Jenis	247.726.170	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	17.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	19.700.000	
10	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang diikuti	60 Kali	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang diikuti	60 Kali	205.866.000	
E	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>420.640.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>508.428.230</b>	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	4 Unit	420.640.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	4 Unit	508.428.230	
F	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>248.318.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>273.518.400</b>	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan	432 Orang	248.318.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan	432 Orang	273.518.400	
G	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>51.728.900</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>51.728.900</b>	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	24.998.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	24.998.900	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Jenis	26.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Jenis	26.730.000	
II	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>85%</b>	<b>542.192.640</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>85%</b>	<b>573.692.640</b>	
A	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>	<b>85%</b>	<b>542.192.640</b>	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>	<b>85%</b>	<b>573.692.640</b>	
1	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti Jumlah Pengaduan yang diterima	33 Aduan 33 Aduan	16.939.000	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti Jumlah Pengaduan yang diterima	33 Aduan 33 Aduan	16.939.000	
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6 Kecamatan	10.020.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6 Kecamatan	10.020.000	
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	150 Publikasi 110 Konten	68.505.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	150 Publikasi 110 Konten	100.005.000	

			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	15 Layanan				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	15 Layanan		
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4 Program	16.863.640	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4 Program	16.863.640	
5	Pelayanan Informasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	520 Dokumen 23 Layanan 9 Data 1 Dokumen	11.500.000	Pelayanan Informasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	520 Dokumen 23 Layanan 9 Data 1 Dokumen	11.500.000	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	36 Kegiatan	19.490.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	36 Kegiatan	19.490.000	
7	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	20 Kelompok	14.200.000	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	20 Kelompok	14.200.000	
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	30 Media 30 Media	384.675.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	30 Media 30 Media	384.675.000	
III	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>75%</b>	<b>1.686.220.000</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>75%</b>	<b>1.686.220.000</b>	
A	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone</b>	<b>100</b>	<b>1.643.000.000</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone</b>	<b>100</b>	<b>1.643.000.000</b>	
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidtdch 275 s.d 400 Mbps di Kabupaten Kota Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	9 Titik 48 OPD	1.643.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidtdch 275 s.d 400 Mbps di Kabupaten Kota Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	9 Titik 48 OPD	1.643.000.000	

			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	48 OPD				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	48 OPD		
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	66 OPD				Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	66 OPD		
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah	66 OPD				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah	66 OPD		
			Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	66 OPD				Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	66 OPD		
<b>B</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota</b>	<b>100%</b>	<b>43.220.000</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota</b>	<b>100%</b>	<b>43.220.000</b>	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi) Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	1 Paket  7 OPD	13.570.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi) Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	1 Paket  7 OPD	13.570.000	
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Aplikasi terintegrasi  Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik  Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	1 Aplikasi  39 OPD  25 Aplikasi  4 Layanan  5 Sistem  0	15.130.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Aplikasi terintegrasi  Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	1 Aplikasi  39 OPD  25 Aplikasi  4 Layanan  5 Sistem  0	15.130.000	
3	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website,Vidcom)	1 Kali	14.520.000	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website,Vidcom)	1 Kali	14.520.000	

			Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara	410 Event				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara	410 Event		
			Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	66 OPD				Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	66 OPD		
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	73.429.050	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	73.429.050	
A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	73.429.050	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	73.429.050	
1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	51.582.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	51.582.000	
			Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)	2 Dokumen				Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)	2 Dokumen		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Kegiatan				Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Kegiatan		
			Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen				Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	1 Kegiatan				Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	1 Kegiatan		
			Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	1 Kegiatan				Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	1 Kegiatan		
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)	1 Orang	7.667.500	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)	1 Orang	7.667.500	
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	1 Dokumen	14.179.550	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	1 Dokumen	14.179.550	
			Jumlah Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral	3 Kegiatan				Jumlah Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral	3 Kegiatan		
			Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel sektoral	60 Variabel				Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel sektoral	60 Variabel		
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	37.069.550	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	37.069.550	
A	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	23.019.550	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	23.019.550	

1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian  Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah	4 Dokumen  39 Website	11.692.550	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian  Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah	4 Dokumen  39 Website	11.692.550	
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Berita/Informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu  Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan  Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	1.000 Berita  52 Kegiatan  57 Titik	11.327.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Berita/Informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu  Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan  Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	1.000 Berita  52 Kegiatan  57 Titik	11.327.000	
B	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>14.050.000</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Tanete Riattang Barat</b>	<b>Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>14.050.000</b>	
3	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1.000 Berita	14.050.000	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1.000 Berita	14.050.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana program dan kegiatan terutama dalam hal kebutuhan jaringan pada area publik.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strateginasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini Program dan kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksanakan secara optimal. Kedua kebijakan dan Program Nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan dalam pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tujuan dan sasaran yang terdapat pada misi ke I (Pertama) yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi Ke V (Lima) yaitu Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah:

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral
		Meningkatnya Keamanan Informasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang Menjadi Pencapaian Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Perubahan “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Misi 1 (pertama) “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Dan Misi Ke 5 (lima) “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik.” Dari kedua misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik dengan menyediakan media Aspirasi dan Aduan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang Transparan , Keterbukaan Informasi Publik dan Lewat Aspirasi dan Aduan Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahan di Kabupaten Bone .Tujuan utama Kemandirian Daerah adalah masyarakat yang sejahtera. Kemandirian dalam hal pengelolaan Pemerintah juga perlu dilakukan mengingat peran Pemerintah yang strategis sebagai fasilitator, akselator dan motivator Pembangunan. Kabupaten/Kota harus berkomitmen kuat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjamin kehidupan yang sehat yang mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang disegala usia, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dalam masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu mengintervensi daerah agar Pencapaian NSPK dan SPM dapat tercapai sesuai target Indikator Utama.

Keberhasilan Pembangunan suatu daerah tergantung kepada kemampuan daerah memobilisasi sumber-sumber yang terbatas sedemikian rupa sehingga akan mampu mendorong perkembangan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah secara komprehensif sehingga masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya dan masyarakat di wilayah tertinggal pada khususnya tersentuh oleh program-program pembangunan secara menyeluruh. Dalam hali ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertugas untuk meningkatkan akses penyediaan jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

### **3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

##### **c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

##### **d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

##### **e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

##### **f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### **g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

#### **2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

##### **a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik

- 2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 5) Pelayanan Informasi Publik
- 6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 7) Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

### **3. Program Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah

### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi
- 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral

### **5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik

- b. Kegiatan a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja, memuat arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

Faktor-faktor yang menjadi bahan Rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang direncanakan terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Keadaan tersebut digambarkan pada tabel T.C. 33 berikut:

Tabel T-C. 33  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6,441,832,700				10,366,154,755				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,622,223,060				7,129,785,670				
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					76,546,500				85,000,000				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	6 Dokumen	25 Dokumen	11,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Laporan	25 Dokumen	65,296,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,565,357,100				4,791,978,000				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	40 orang/bulan	100 Persen	3,552,898,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,756,978,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Laporan	100 Persen	12,458,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	35,000,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>10,000,000</b>				<b>23,000,000</b>		
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pendukung	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Orang	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,000,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>383,471,670</b>				<b>650,000,000</b>		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	4,597,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	90,688,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	2,932,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	119,714,600	Pajak Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	20,184,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	145,354,000	Pajak Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	230,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>294,236,890</b>						<b>1,181,807,670</b>
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Unit	100 Persen	4,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	14 Unit	100 Persen	289,890,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,141,807,670
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>255,518,400</b>						<b>300,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Capaian Program	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	255,518,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>37,092,500</b>				<b>98,000,000</b>		
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Unit	100 Persen	24,612,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	48,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	22 Unit	100 Persen	12,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	50,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>							<b>403,802,640</b>				<b>1,325,374,470</b>		
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>403,802,640</b>				<b>1,325,374,470</b>		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	17,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	70,000,000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	10,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	30,000,000

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	100,065,000	Pajak Daerah		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	150,000,000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	17,903,640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	110,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	11,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	60,000,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	19,060,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	80,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	50 Orang	100 Persen	14,025,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	35,000,000		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	214,025,000	Pajak Daerah		Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100 Persen	790,374,470		
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>									<b>1,415,807,000</b>				<b>1,910,994,615</b>		
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>1,372,497,500</b>						<b>1,790,994,615</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Sub.Domain yang dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Bone	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	54 Unit	100 Persen	1,372,497,500	Pajak Daerah		Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	1,790,994,615		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							43,309,500		120,000,000			
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan E-Government di lingkup daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	12 Dokumen	100 Persen	13,538,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	40,000,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase pengelolaan E-Government di lingkup daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	2 Unit	100 Persen	15,182,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	40,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase pengelolaan E-Government di lingkup daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	12 Dokumen	100 Persen	14,589,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	40,000,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							74,583,050		140,000,000			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							74,583,050		140,000,000			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							74,583,050		140,000,000			
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Daerah diris Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	50,184,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah diris Tepat Waktu	100 Persen	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Orang	100 Persen	8,269,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	100 Persen	40,000,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	16,129,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	100 Persen	40,000,000	
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>36,482,550</b>				<b>133,000,000</b>		
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>							<b>36,482,550</b>				<b>133,000,000</b>		
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>22,484,550</b>				<b>68,000,000</b>		
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan informasi dan jaringan pemerintah daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	11,037,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	<b>33,000,000</b>	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase keamanan informasi dan jaringan pemerintah daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	11,447,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	<b>35,000,000</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				13,998,000				65,000,000					
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	65 Perangkat Daerah	100 Persen	13,998,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	65,000,000	
<b>TOTAL</b>									<b>6,552,898,300</b>				<b>10,639,154,755</b>					

## **BAB V PENUTUP**

Visi dan Misi Pemerintah Daerah merupakan gambaran cita-cita luhur Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun ke depan.

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai dengan BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
2. Rencana Kerja mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memberikan kepada masyarakat penggunaannya. Pengimplementasi Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selamatahun anggaran 2023.

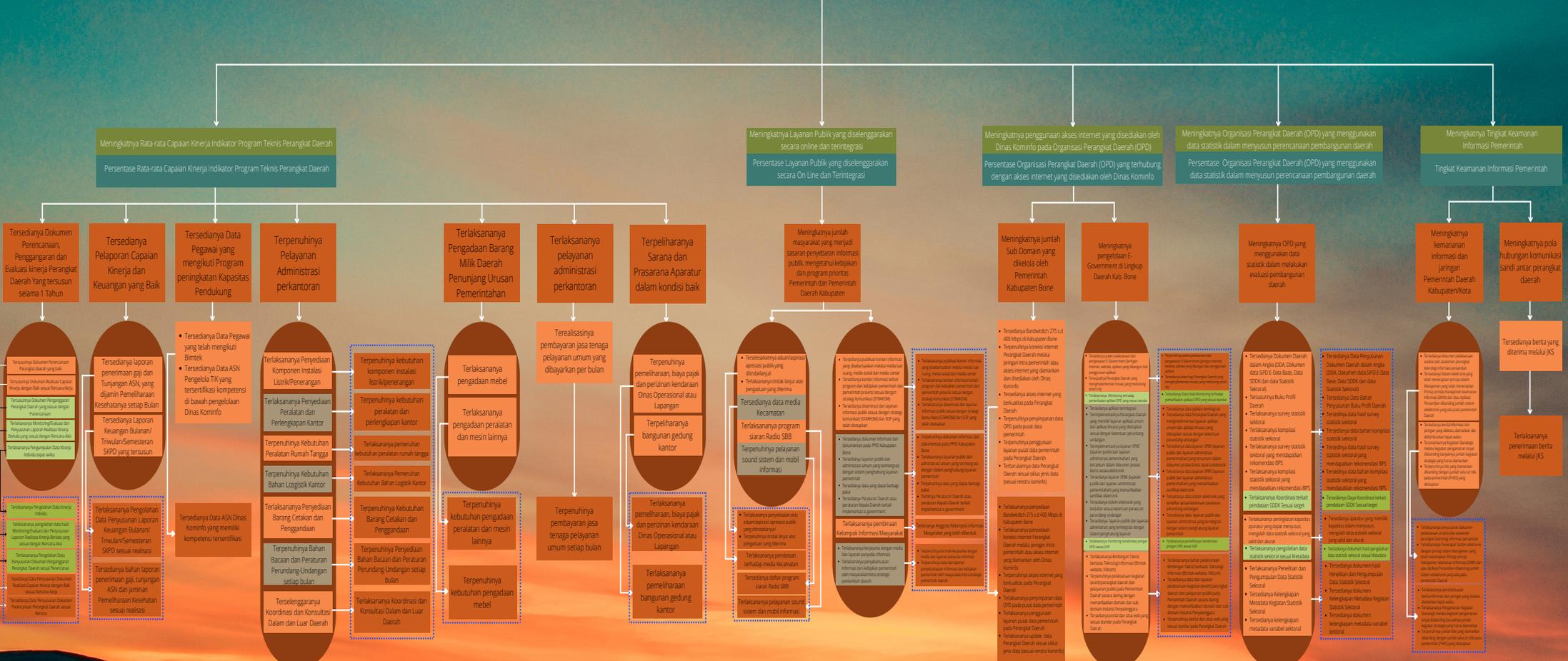
Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Kerja ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai tujuan dan sasaran yang ingin capai.

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat menjadi Pedoman yang memadai dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 yang terlaksana dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone guna mewujudkan Visi Kabupaten Bone yaitu “Masyarakat Bone yang **Mabessa** (Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera)”.

1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government
4. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral
5. Meningkatnya Keamanan Informasi

1. Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
2. Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo
4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Indeks Keamanan Informasi



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							6,441,832,700					10,366,154,755			
2	16	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							4,622,223,060					7,129,785,670			
2	16	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							76,546,500					85,000,000		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	6 Dokumen	25 Dokumen	11,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	45,000,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Laporan	25 Dokumen	65,296,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	16	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							3,565,357,100					4,791,978,000		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	40 Orang/bulan	100 Persen	3,552,898,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,756,978,000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Laporan	100 Persen	12,458,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	35,000,000
2	16	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							10,000,000					23,000,000		
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pendukung	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Orang	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	23,000,000
2	16	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							383,471,670					650,000,000		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	4,597,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Kategori Kode	Sub Kategori Kode	Kategori Kode	Sub Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	90,688,860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	200,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	2,932,560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	119,714,600	Pajak Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	20,184,050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	145,354,000	Pajak Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	230,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>294,236,890</b>					<b>1,181,807,670</b>
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Unit	100 Persen	4,346,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	14 Unit	100 Persen	289,890,890	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,141,807,670
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>255,518,400</b>					<b>300,000,000</b>
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	255,518,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>37,092,500</b>					<b>98,000,000</b>





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase pengelolaan E-Government di lingkup daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	2 Unit	100 Persen	15,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	40,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan E-Government di lingkup daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	50 Persen	12 Dokumen	100 Persen	14,589,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50 Persen	40,000,000
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>74,583,050</b>		<b>140,000,000</b>			
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>							<b>74,583,050</b>		<b>140,000,000</b>			
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>74,583,050</b>		<b>140,000,000</b>			
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	50,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	100 Persen	60,000,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Orang	100 Persen	8,269,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	100 Persen	40,000,000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	16,129,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data Statistik Daerah dirisi Tepat Waktu	100 Persen	40,000,000
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>36,482,550</b>		<b>133,000,000</b>			
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>							<b>36,482,550</b>		<b>133,000,000</b>			
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>22,484,550</b>		<b>68,000,000</b>			
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan informasi dan jaringan pemerintah daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	11,037,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	33,000,000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase keamanan informasi dan jaringan pemerintah daerah kab.kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	11,447,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	35,000,000
2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>13,998,000</b>		<b>65,000,000</b>			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	65 Perangkat Daerah	100 Persen	13,998,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian	100 Persen	65,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>6,552,898,300</b>		<b>10,639,154,755</b>				